

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK,  
PDRB, IPM, PENGANGGURAN TERHADAP  
TINGKAT KEMISKINAN  
DI KABUPATEN / KOTA JAWA TENGAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**WHISNU ADHI SAPUTRA**  
**NIM. C2B607058**

**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2011**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Whisnu Adhi Saputra  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B607058  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan)  
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **ANALISIS PENGARUH JUMLAH  
PENDUDUK, PDRB, IPM,  
PENGANGGURAN TERADAP  
TINGKAT KEMISKINAN DI  
KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH**  
Dosen Pembimbing : Drs. Y Bagio Mudakir, MSP

Semarang, 27 Mei 2011

Dosen Pembimbing



(Drs. Y Bagio Mudakir, MSP)

NIP. 195406091981031004

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Whisnu Adhi Saputra  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B607058  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan)  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH JUMLAH  
PENDUDUK, PDRB, IPM,  
PENGANGGURAN TERHADAP  
TINGKAT KEMISKINAN DI  
KABUPATEN / KOTA JAWA  
TENGAH**

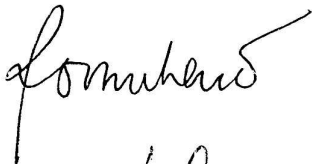
**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 13 Juni 2011**

Tim Penguji

1. Drs. Y Bagio Mudakir, MSP

(  )

2. Drs. R.Mulyo Hendarto, MSP.

(  )

3. Johanna Maria Kodoatie, SE., Mec., Ph.D. (

 )

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Whisnu Adhi Saputra, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 Mei 2011  
Yang membuat pernyataan,

Whisnu Adhi Saputra  
NIM : C2B607058

## *MOJIBO DAN PERSEMBAHAN*

*“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya”*

*(Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 45-46)*

*“ Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bagaimana kita bangkit kembali setelah kita jatuh”*

*(Confusius)*

*“ Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna “*

*(Albert Einstein)*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk Ayah dan Ibuku tercinta.....*

## **ABSTRACT**

*Poverty is a complex problem which is related with many kind of aspects like the rights for food, health, education, job, etc. To decrease the poverty needs support and collaboration of society and the government's serious efforts. The average rate of poverty in Central Java is relatively higher than other 6 provinces of Java, lying on first level between 2004-2008.*

*This study is aimed to analyze how and how much the influence of population variabel, GRDP, Human Development Index and unemployment to the rate of poverty in regency/city of Central Java. Regression model used is Ordinary Least Squares Regression by using a panel data using fixed effects approach. This study uses a dummy year as one of the variables. The use of dummy years in this study is to look at variations in poverty levels over time in Central Java.*

*The test result simultaneously shows that, totally, independent variable together can point it's influence to the rate of poverty. And R-squared value of 0.609 which means 60,9% rate of poverty variable can be explained by independent variable. While the rest, the 40%, explained by other factors outside of the model.*

*Research results show population variable positively and significantly influence the rate of poverty in Central Java, GRDP negatively and significantly influence the rate of poverty in Central Java, Human Development Index negatively and significantly influence the rate of poverty in Central Java and unemployment negatively and not significantly influence the rate of poverty in Central Java.*

*Keywords: rate of poverty, population, GRDP, Human Development Index and unemployment*

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa Tengah relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan 6 provinsi yang ada di pulau jawa, yaitu menempati peringkat pertama antara kurun waktu tahun 2004-2008.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Model regresi yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Squares Regression Analysis*) dengan menggunakan Panel Data dengan menggunakan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*). Penelitian ini menggunakan dummy tahun sebagai salah satu variabelnya. Penggunaan dummy tahun dalam penelitian ini adalah untuk melihat variasi tingkat kemiskinan antar waktu di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.

Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas (Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran) secara bersama-sama dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. Dan nilai R-squared sebesar 0.609 yang berarti sebesar 60,9 persen variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 40 persen dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, dan Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah

Kata kunci : Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya penulis sampai saat ini masih diberikan bermacam kenikmatan tiada ternilai harganya hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Adalah suatu hal yang mustahil tentunya bila skripsi ini dapat selesai tanpa banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih :

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, Msi., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs. Y Bagio Mudakir, MSP selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan, nasehat, dan saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Drs. Waridin MS. Ph.D selaku dosen wali yang telah memberikan petunjuk dan dorongan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Ibu Evi Yulia Purwanti, SE, Msi selaku Koordinator jurusan IESP yang banyak memberikan pengarahan dan motivasi selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.



6. Ayahanda tercinta Tri Wibowo dan Ibunda tersayang Sri Wahyuningsih, atas segala curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang engkau berikan.
7. Saudara kandungku satu-satunya Handyan Bima Putra, terimakasih atas segala motivasinya.
8. Petugas perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang telah banyak membantu penulis dalam perolehan data.
9. Tim II KKN Kecamatan Banyumanik Kelurahan Pudak Payung. Kenangan manis bersama kalian tidak terlupakan (Tiga puluh lima hari bersama menjadi saudara, kita tetap saudara).
10. Elsa Betha Pramusinta terima kasih atas kasih sayang, motivasi, doa, serta nasehat-nasehat dan kesabaran mendengar keluh kesah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Anak-anak senasib seperjuangan Arjanggal, bajul, popo, ilham. Terima kasih atas pertemanan yang tidak bisa saya lupakan, semoga kita bisa mencapai cita-cita kita, Amien.
12. Teman-teman IESP Reguler II 07 sukma, diana, dita, dinar, antok, archi, lifta, margin, selvi, ardi, dani, ple, lina, nita, merna, angke dan seluruh teman-teman IESP Reguler II 07 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk segala bantuan, kerjasama, dan kenangan yang telah kalian berikan.
13. Konco tuo: Mbak Ayu, Mbak Yeni, Mbak Riska, dan Mbak Ulpa atas segala nasehat (omongan tuo) dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Mas anto yang bersedia diajak konsultasi dan direpoti selama ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah penulis dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ikut mendo'akan semoga semua amal kebaikan pihak-pihak sebagaimana tercantum diatas mendapat balasan yang setimpal dari Allah

SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Semarang, 27 Mei 2011

Whisnu Adhi Saputra.

C2B607058

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan .....	12
1.3.1 Tujuan .....	12
1.3.2 Kegunaan.....	13
1.4 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Landasan Teori .....	15
2.1.1 Kemiskinan .....	15
2.1.2 Ukuran Kemiskinan .....	22
2.1.3 Pertumbuhan Penduduk .....	23
2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto .....	26
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia.....	28
2.1.5.1 Definisi Pembangunan Manusia .....	29
2.1.5.2 Indeks Pembangunan Manusia.....	31
2.1.5.3 Indeks Harapan Hidup.....	33
2.1.5.4 Indeks Pendidikan .....	33
2.1.5.5 <i>Purchasing Power Parity</i> / Paritas Daya	

Beli (PPP).....	35
2.1.6 Pengganguran.....	36
2.2 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel	
Dependen.....	41
2.2.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat	
Kemiskinan .....	40
2.2.2 Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan .....	42
2.2.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap	
Tingkat Kemiskinan .....	44
2.2.4 Pengaruh Pengganguran terhadap Tingkat Kemiskinan ...	45
2.3 Penelitian Terdahulu .....	47
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	54
2.5 Hipotesis.....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	57
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	60
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	62
3.4 Metode Analisis .....	63
3.4.1 Metode Analisis Data Panel .....	63
3.4.2 Estimasi Model .....	66
3.5 Deteksi Penyimpanagn Asumsi Klasik .....	70
3.5.1 Deteksi Normalitas .....	70
3.5.2 Deteksi Multikolinearitas .....	71
3.5.3 Deteksi Autokorelasi .....	71
3.5.4 Deteksi Heteroskedastisitas.....	72
3.6 Pengujian Kriteria Statistik .....	73
3.6.1 Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F).....	73
3.6.2 Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	74
3.6.3 Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ ).....	76
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	78

4.1.1	Kondisi Geografis .....	78
4.1.2	Kemiskinan .....	79
4.1.3	Jumlah Penduduk .....	81
4.1.4	Produk Domestik Regional Bruto (PRDB).....	83
4.1.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	85
4.1.6	Pengangguran.....	87
4.2	Analisis Data .....	89
4.2.1	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	89
4.2.1.1	Deteksi Multikolinearitas .....	89
4.2.1.2	Deteksi Autokorelasi.....	90
4.2.1.3	Deteksi Heterokedastisitas .....	91
4.2.1.4	Deteksi Normalitas.....	93
4.2.2	Pengujian Kriteria Statistik .....	94
4.2.2.1	Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	94
4.2.2.2	Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F).....	95
4.2.2.3	Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji-t).....	96
4.3	Interpretasi Hasil dan Pembahasan .....	97
4.3.1	Jumlah Penduduk .....	98
4.3.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	99
4.3.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	99
4.3.4	Tingkat Pengangguran (PG).....	100
4.3.5	Dummy Tahun .....	102
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>103</b>
5.1	Kesimpulan .....	103
5.2	Keterbatasan.....	105
5.3	Saran.....	105

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Persentase Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2008 .....	4
Tabel 1.2	Persentase Kemiskinan 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2004-2008 .....	5
Tabel 1.3	Persentase IPM di Jawa Tengah Tahun 2005-2008 .....	6
Tabel 1.4	Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Dan laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Tahun 2004-2008 .....	8
Tabel 1.5	Jumlah Penduduk di Jawa Tengah Tahun 2004-2008 (Jiwa).....	9
Tabel 1.6	Jumlah Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah Tahun 2004-2008 (Jiwa) .....	10
Tabel 2.1	Komponen Indek Pembangunan Manusia .....	32
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2008 (Dalam Satuan Jiwa).....	78
Tabel 4.1	<i>Pairwise Correlation</i> Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat pengangguran, dan <i>Dummy</i> Tahun Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005-2008 .....	90
Tabel 4.2	Hasil Deteksi Langrange-Multiplier (LM) Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat pengangguran, dan <i>Dummy</i> Tahun Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005-2008 .....	91
Tabel 4.3	Hasil Deteksi Heteroskedastisitas Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat pengangguran, dan <i>Dummy</i> Tahun Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005-2008 .....	92
Tabel 4.4	Hasil Regresi Utama Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Bruto, Indeks Pembangunan Manusia,	

	Tingkat pengangguran, dan <i>Dummy</i> Tahun Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005-2008 .....	94
Tabel 4.5	Nilai t-statistik Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat pengangguran, dan <i>Dummy</i> Tahun Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005-2008 .....	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Kuznets.....	17
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	55
Gambar 4.1 Rata-rata Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008 .....	80
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2005-2008 .....	82
Gambar 4.3 PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2008 (dalam satuan rupiah) .....	84
Gambar 4.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008.....	86
Gambar 4.5 Gambar Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008.....	88
Gambar 4.6 Hasil Uji Jarque-Berra Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, dan <i>Dummy</i> Tahun Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008 .....	93



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut *World Bank* (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id))

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Menurut Pantjar Simatupang dan Saktyanu K (2003), Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Bappeda Jateng (2007), upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui lima pilar yang disebut “*Grand Strategy*”. Pertama, perluasan kesempatan kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Kedua, pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat dan memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam

pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar. Ketiga, peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. Keempat, perlindungan sosial, dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial. Kelima, kemitraan regional, dilakukan untuk pengembangan dan menata ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional, dan internasional guna mendukung pelaksanaan ke empat strategi diatas.

Baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yaitu masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Oleh sebab itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah

pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah memperlihatkan pengaruh yang positif. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang mengalami pola yang menurun. Tabel 1.1 menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 tingkat kemiskinan sebesar 20,49 persen dan naik menjadi 22,19 persen pada tahun 2006, kemudian turun menjadi 20,43 persen di tahun 2007 dan 18,99 persen pada tahun 2008.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Kemiskinan di Jawa Tengah**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase</b>
2005	20,49
2006	22,19
2007	20,43
2008	18,99

*Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2008*

Keberhasilan provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi. Pada tabel 1.2 menunjukkan tingkat kemiskinan di enam Provinsi di pulau Jawa. Rata-rata tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih yang paling tinggi dibanding dengan provinsi lain di pulau Jawa, yaitu sebesar 20,52 persen. Peringkat kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata tingkat

kemiskinan sebesar 19,88 persen, peringkat ketiga ditempati oleh Provinsi DIY dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 18,85 persen, peringkat keempat ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 13,52 persen. Provinsi Banten dengan rata-rata tingkat kemiskinan 8,96 persen menempati posisi kelima dan terakhir ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 4,27 persen.

**Tabel 1.2**  
**Persentase Kemiskinan Enam Propinsi di Pulau Jawa**  
**Tahun 2004-2008**

No	Provinsi	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
1	DKI Jakarta	3,61	4,57	4,61	4,29	4,27
2	Banten	8,86	9,79	9,07	8,15	8,96
3	Jawa Barat	13,06	14,49	13,55	13,01	13,52
4	Jawa Timur	19,95	21,09	19,98	18,51	19,88
5	DIY	18,95	19,15	18,99	18,32	18,85
<b>6</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>20,49</b>	<b>22,19</b>	<b>20,43</b>	<b>18,99</b>	<b>20,52</b>

Sumber: *BPS Jateng, Data dan Informasi Kemiskinan Jateng*

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah merupakan tingkat kemiskinan agregat dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan di 35 Kabupaten di Jawa Tengah masih tidak merata, dan sebagian besar tingkat kemiskinan masih tinggi. Untuk itu perlu dicari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi tiap kabupaten/kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari

indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Lanjouw dkk (dalam Yani Mulyaningsih, 2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

**Tabel 1.3**  
**Persentase IPM Di Jawa Tengah**  
**Tahun 2005-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase</b>
2005	69,8
2006	70,25
2007	70,92
2008	71,6

*Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2008*

Tabel 1.3 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan 2008, yaitu

sebesar 69,8 persen pada tahun 2005, 70,25 persen pada tahun 2006, 70,92 pada tahun 2007, dan 71,6 persen pada tahun 2008.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2006). Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut

Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia dewasa ini. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional (Todaro 2000).

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa sampai tahun 2008 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari 5,35 persen pada tahun 2005 menjadi 5,46 persen pada tahun 2008.

**Tabel 1.4**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000**  
**Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**Jawa Tengah Tahun 2004 – 2008**

Tahun	PDRB Atas dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2005	143.051.213,88	5,35
2006	150.682.654,74	5,33
2007	159.110.253,77	5,59
2008	167.790.369,85	5,46

*Sumber : PDRB Jawa Tengah tahun 2008*

Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Menurut Esmara, dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat.

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu



kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Dan berdasarkan tabel 1.5 bahwa jumlah penduduk Jawa Tengah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 bergerak fluktuatif namun cenderung naik dari tahun ke tahun.

Di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia (Maier dalam Mudrajad Kuncoro,1997).

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk Di Jawa Tengah Tahun 2004-2008 (Jiwa)**

No.	Tahun	Jumlah
1	2005	32.908.850
2	2006	32.177.730
3	2007	32.380.279
4	2008	32.626.390

*Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2008*

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Menurut Sadono Sukirno (2000), Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Pengangguran Terbuka Di Jawa Tengah Tahun 2004-2008 (Jiwa)**

No.	Tahun	Jumlah
1	2005	978.952
2	2006	1.197.244
3	2007	1.360.219
4	2008	1.227.308

*Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2008*

Tabel 1.6 menunjukkan tingkat pengangguran di Jawa Tengah tergolong masih tinggi, tingkat pengangguran di Jawa Tengah tidak stabil, mengalami beberapa kali fase naik turun. Pada tahun 2005, tingkat pengangguran sebesar 978.952 jiwa, kemudian naik menjadi 1.197.244 jiwa pada tahun 2006. Peningkatan tingkat pengangguran terjadi secara beruntun dari tahun 2007 dan tahun 2007, dari 1.360.219 jiwa di tahun 2007 menjadi 1.227.308 jiwa di tahun 2008.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2005-2008 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi rata-rata tingkat kemiskinannya dibanding provinsi-provinsi lain di pulau Jawa adalah yang paling tinggi. Oleh karena itu penting untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh variabel jumlah penduduk, PDRB, IPM, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008. Penelitian ini akan menggunakan metode data panel, yaitu penggabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Untuk mengolah data panel akan digunakan metode regresi panel data. Untuk membedakan suatu objek dengan objek lainnya akan digunakan variabel semu (*dummy*). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan model regresi dengan metode *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) (Gujarati, 2003)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 hingga tahun 2008 mengalami periode yang relatif baik karena mengalami tren yang menurun dari 20,49 persen di tahun 2005 menjadi 18,99 persen di tahun 2008, meskipun sempat mengalami kenaikan di tahun 2006 menjadi 22,19 persen. Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah masih yang paling tinggi dibanding dengan Provinsi lain di pulau Jawa. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota agar dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk

mengatasi masalah kemiskinan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Jawa Tengah masih berada dibawah garis kemiskinan, merupakan suatu kenyataan yang membuat kita prihatin karena seolah-olah kemiskinan itu tetap muncul dan merupakan bagian dari pembangunan, padahal pembangunan ditujukan untuk memberantas kemiskinan dan bukan berjalan bersama-sama. Besarnya angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama jumlah penduduk, PDRB, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
4. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

### **1.3 Tujuan dan kegunaan**

#### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

3. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
4. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

### **1.3.2 Kegunaan**

1. Pengambil kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan.

2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan, keterbatasan dan Saran.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari studi ini yang selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang

berupa pertanyaan kajian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian terakhir dalam bab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran dan penentuan hipotesis awal yang akan diuji.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian. Selain itu bab ini juga menguraikan mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan mengenai hasil analisis dari objek penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini adalah bab terakhir, bab yang menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan, serta saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. (<http://wikipedia.com>)

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan.

Menurut *World Bank*, dalam definisi kemiskinan adalah:

*"The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other".*

Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat

memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

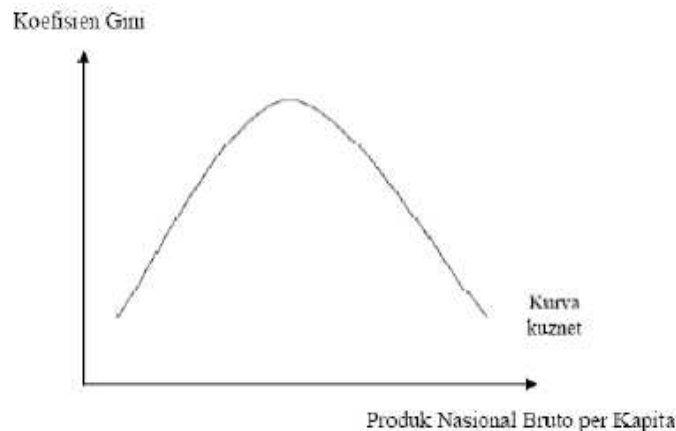
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.



Ketika pendapatan perkapita meningkat dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang. Ada teori yang mengatakan bahwa ada *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan rendah, sehingga di banyak NSB tidak ada *trade off* antara pertumbuhan dan ketidakmerataan (Mudrajad Kuncoro, 2006).

Simon Kuznets mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Hal tersebut digambarkan dalam kurva Kuznets gambar 2.1, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif.

**Gambar 2.1**  
**Kurva Kuznets**



*Sumber: Todaro, 2003*

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo, 2003).

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse, 1953 dalam Mudrajat Kuncoro, (1997) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

## 2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

## 3. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Menurut Sharp (dalam Mudrajad Kuncoro, 2001) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan

muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai.

Pemerintah telah mempersiapkan beberapa program prioritas penanggulangan kemiskinan dalam tahun 2007 didukung oleh beberapa program prioritas lain, antara lain:

1. Memberdayakan kelompok miskin yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin dengan meningkatkan etos kerja, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, perbaikan konsumsi dan peningkatan gizi, serta perbaikan kemampuan dalam penguasaan IPTEK.
2. Menerapkan kebijakan ekonomi moral yaitu pengembangan sistem ekonomi moral sangat diperlukan sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi harus adil, sehingga dibutuhkan keadilan ekonomi yang bersumber pada Pancasila bukan pada ekonomi modern yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.
3. Melakukan pemetaan kemiskinan yaitu langkah awal dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu mengenali karakteristik dari penduduk yang miskin sehingga diperlukan pemetaan kemiskinan yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan persoalan yang mereka alami.
4. Melakukan program pembangunan wilayah seperti Inpres dan transmigrasi serta memberikan pelayanan perkreditan melalui lembaga perkreditan pedesaan seperti BKD dan KCK – KUD.

### **2.1.2 Ukuran Kemiskinan**

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku

umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

### **2.1.3 Pertumbuhan Penduduk**

Menurut Maltus (dikutip dalam Lincolin Arsyad, 1997) kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi

pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas tingkat subsiten.

Todaro (2000) menyatakan bahwa dalam perhitungan indeks kemiskinan dengan pengukuran indeks Foster Greer Thorbecke yang sering disebut juga sebagai kelas  $P_\alpha$  dari ukuran kemiskinan yaitu dirumuskan sebagai berikut:

$$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

Dimana:

$\alpha = 0, 1, 2$

$z =$  Garis kemiskinan

$y =$  Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i = 1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y < z$

$q =$  Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

$n =$  Jumlah penduduk.

Jika:

- $\alpha = 0$ , maka diperoleh *Head Count Index* ( $0 P$ ), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.
- $\alpha = 1$ , maka diperoleh *Poverty Gap Index* ( $1 P$ ), yaitu indeks kedalaman kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indek, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- $\alpha = 2$ , maka diperoleh *Poverty Severity* ( $2 P$ ), yaitu indeks keparahan



kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Menurut Maier (dikutip dari Mudrajat Kuncoro, 1997) di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan.

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.
2. Banyak negara dimana penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya.
3. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarnya kota-kota di NSB

membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.

#### **2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto .**

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Menurut Pendekatan Produksi**

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan

menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

2. Menurut pendekatan pengeluaran,

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu:

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b) Konsumsi pemerintah.
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d) Perubahan stok.
- e) Ekspor netto.

3. Menurut pendekatan pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk

Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2000), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, Kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral / lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

#### **2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia**

Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun

yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat.

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak.

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas perumusan kebijakan dan penentuan program pembangunan. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.

#### **2.1.5.1 Definisi Pembangunan Manusia**

Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"a process of enlarging peoples's choices"*). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan

suatu negara adalah manusia sebagai aset negara yang sangat berharga. Definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhannya ekonominya.

Sebagaimana laporan UNDP (1995), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata;
- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal;
- d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan;

- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Konsep pembangunan manusia yang diprakarsai dan ditunjang oleh UNDP ini mengembangkan suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan pertama sekali pada tahun 1990. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*).

#### **2.1.5.2 Indeks Pembangunan Manusia**

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu:

1. Indeks Harapan Hidup
2. Indeks Pendidikan
3. Indeks Standart Hidup Layak

Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3)$$

Di mana :

- X1 = Indeks Harapan Hidup  
 X2 = Indeks Pendidikan  
 X3 = Indeks Standart Hidup Layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sum_{i=1}^3 I_i \quad ; \quad I_i = \frac{X_i - \text{Min } X_i}{\text{Max } X_i - \text{Min } X_i}$$

Di mana:

- $I_i$  = Indeks komponen IPM ke  $i$  di mana  $i = 1,2,3$   
 $X_i$  = Nilai indikator komponen IPM ke  $i$   
 $\text{Max } X_i$  = Nilai maksimum  $X_i$   
 $\text{Min } X_i$  = Nilai minimum  $X_i$

**Tabel 2.1**  
**Komponen Indeks Pembangunan Manusia**

Indikator Komponen IPM	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
Angka Harapan Hidup ( $e_0$ )	25,0	85,0
Angka Melek Huruf (Lit)	0	100
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	0	15
Purchasing Power Parity (PPP)	360.000	737.720

Sumber: BPS, BAPPENAS, UNDI, 2004



### **2.1.5.3 Indeks Harapan Hidup**

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel  $e_0$  diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

### **2.1.5.4 Indeks Pendidikan**

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.

Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan

proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk. MYS dihitung secara tidak langsung, pertama-tama dengan memberikan Faktor Konversi pada variabel “Pendidikan yang Ditamatkan” sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2. Langkah selanjutnya adalah dengan menghitung rata-rata tertimbang dari variabel tersebut sesuai dengan bobotnya.

$$MYS = \frac{\sum f_i \times s_i}{\sum f_i}$$

Di mana :

MYS = Rata – rata lama sekolah

$f_i$  = Frekuensi penduduk berumur 10 tahun ke atas pada jenjang pendidikan  $i$ ,  $i$   
= 1,2,...,11

$s_i$  = Skor masing-masing jenjang pendidikan

Angka melek huruf pengertiannya tidak berbeda dengan definisi yang telah secara luas dikenal masyarakat, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Pengertian rata-rata lama sekolah, secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut: misalkan di Provinsi Sumatera Utara ada 5 orang tamatan SD, 5 orang tamatan SMP, 5 orang tamatan SMA, 5 orang tidak sekolah sama sekali, maka rata- rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Utara adalah  $\{5 (6) + 5 (9) + 5 (12) + 5 (0) \} : 20 = 6,25$  tahun.

Setelah diperoleh nilai Lit dan MYS, dilakukan penyesuaian agar kedua nilai ini berada pada skala yang sama yaitu antara 0 dan 1. Selanjutnya kedua nilai yang telah disesuaikan ini disatukan untuk mendapatkan indeks pendidikan dengan perbandingan bobot 2 untuk Lit dan 1 untuk MYS, sesuai ketentuan UNDP. Dengan demikian untuk menghitung indeks pendidikan digunakan rumus:

$$\text{IP} = 2/3 \text{ Indeks Lit} + 1/3 \text{ Indeks MYS}$$

Syaiful Anwar mengatakan pemberantasan buta aksara merupakan salah satu fokus penting untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia. Berhasilnya program pemberantasan buta aksara akan membuat warga percaya diri dan berdaya untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan.

#### **2.1.5.5 Purchasing Power Parity / Paritas Daya Beli (PPP)**

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan *real per kapita GDP adjusted*. Untuk perhitungan IPM ub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan *concern* IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP dengan tahapan sebagai berikut (berdasarkan ketentuan UNDP):

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per tahun untuk 27 komoditi dari SUSENAS Kor yang telah disesuaikan (=A).
- b. Menghitung nilai pengeluaran riil (=B) yaitu dengan membagi rata-rata pengeluaran (A) dengan IHK tahun yang bersangkutan.
- c. Agar indikator yang diperoleh nantinya dapat menjamin keterbandingan antar daerah, diperlukan indeks "Kemahalan" wilayah yang biasa disebut dengan daya beli per unit (= PPP/ Unit). Metode penghitungannya disesuaikan dengan metode yang dipakai *International Comparison Project* (ICP) dalam menstandarkan GNP per kapita suatu negara. Data yang digunakan adalah data kuantum per kapita per tahun dari suatu basket komoditi yang terdiri dari 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul sesuai ketentuan UNDP. Penghitungan PPP/unit dilaksanakan dengan rumus :

$$PPP/unit = Ri = \frac{\sum_{j=1}^{27} E(i,j)}{27 \sum P(i,j) (i,j)}$$

Di mana:

$E(i,j)$  = Pengeluaran untuk komoditi j di Provinsi i

$P(i,j)$  = Harga komoditi j di Provinsi i

$Q(i,j)$  = Jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di Provinsi i

### 2.1.6 Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah

digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Oleh sebab itu, menurut Sadono Sukirno (2000) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Sedangkan menurut Edwards (1974), bentuk-bentuk pengangguran adalah:

1. Pengangguran terbuka (*open unemployment*), adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka.
2. Setengah pengangguran (*under unemployment*), adalah mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan.

3. Tenaga kerja yang lemah (*impaired*), adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
4. Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*.
2. Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di negara yang sedang berkembang menjadi semakin serius. Tingkat pengangguran terbuka sekarang ini yang ada di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia rata-rata sekitar 10 persen dari seluruh angkatan kerja di perkotaan. Masalah ini dipandang lebih serius lagi bagi mereka yang berusia antara 15 - 24 tahun yang kebanyakan mempunyai pendidikan yang lumayan.

Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak saja dari masalah kesempatan kerja di negara yang sedang berkembang yang bagaikan ujung sebuah gunung es. Apabila mereka tidak bekerja konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi seperti ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah kemiskinan yang ada.

Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demikian, adalah salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka (Lincoln Arsyad, 1997)

Di samping penjelasan tersebut, salah satu mekanisme pokok untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang adalah memberikan upah yang memadai dan menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat miskin (Lincoln Arsyad, 1997).

Dian Octaviani (2001) menyatakan bahwa sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin.

Besarnya dampak krisis terhadap kemiskinan yang menyebabkan menjamurnya insiden kebangkrutan sebagai akibat tekanan pada kesempatan kerja di sektor informal perkotaan semakin besar. Hal tersebut menunjukkan ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dengan luasnya kemiskinan. Pada negara yang sedang berkembang bukan saja menghadapi kemerosotan dalam ketimpangan relatif tetapi juga masalah kenaikan dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran. Besarnya dimensi kemiskinan tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau konsumsinya berada di bawah tingkat minimum yang telah ditetapkan. Masyarakat miskin pada umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, melemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.



Oleh sebab itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah telah merumuskan berbagai rencana untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak guna mengurangi tingkat pengangguran. Rencana tersebut antara lain:

1. Meningkatkan efektifitas dan kemampuan kelembagaan pemerintah dalam menegakkan hubungan industrial yang manusiawi.
2. Meningkatkan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam rangka mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha.
4. buruh migran di dalam dan luar Meningkatkan perlindungan terhadap negeri.

## **2.2 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen**

### **2.2.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Menurut Maier (di kutip dari Mudrajad Kuncoro,1997), jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Ada dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh penduduk pada pembangunan. Pertama, adalah pandangan pesimistis yang berpendapat bahwa penduduk (pertumbuhan penduduk yang pesat) dapat menghantarkan dan mendorong pengurasan sumberdaya, kekurangan tabungan,

kerusakan lingkungan, kehancuran ekologis, yang kemudian dapat memunculkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kelaparan (Ehrlich, 1981). Kedua adalah pandangan optimis yang berpendapat bahwa penduduk adalah asset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan prolosi inovasi teknologi dan institusional (Simon dikutip dalam Thomas, et al., 2001: 1985-1986) sehingga dapat mendorong perbaikan kondisi sosial. Di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia.

Menurut Todaro (2000) bahwa besarnya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal itu dibuktikan dalam perhitungan indek Foster Greer Thorbecke (FGT), yang mana apabila jumlah penduduk bertambah maka kemiskinan juga akan semakin meningkat.

Menurut Hermanto dan Dwi (2007) dalam penelitiannya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan metode panel data mengimplikasikan bahwa jumlah penduduk berhubungan positif dengan kemiskinan.

### **2.2.2 Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi

harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2001) pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, Kabupaten, atau kota.

Menuru Kuznet (dikutip dari Tulus Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2007).

### **2.2.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan**

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

Todaro (2000) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Yani Mulyaningsih (2008) indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*Longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Lanjouw, dkk. (2001) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

#### **2.2.4 Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan**

Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat

kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Lincoln Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin.

Dian Octaviani (2001) mengatakan bahwa sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin. Yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian tentang kemiskinan di berbagai negara telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan daerah dan periode waktu yang berbeda pula, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyu Winarti (2006) yang berjudul "*Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*" bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh serta dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin Indonesia, hal ini dilakukan karena jumlah penduduk miskin akibat krisis belum berhasil dikurangi bahkan cenderung meningkat. Penelitian ini menggunakan data panel dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, PDRB, tingkat inflasi,

jumlah lulusan tingkat smp, sma, agrishare, industri share, dan dummy krisis. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang mampu mengurangi kemiskinan suatu daerah melainkan efek kebawah (*tickle down effect*).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Deny Tisna Amijaya (2008) yang berjudul “Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004. Penelitian ini menggunakan metode Panel Data dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Dalam penelitian ini digunakan kajian empiris Hermanto Siregar dan Dwi Wahyu Winarti (2006) sebagai acuan utama penelitian ini. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini terdapat beberapa kesamaan antara lain mengenai topik dan permasalahan yang akan dibahas, tetapi



yang membedakan penelitian ini dengan kajian empiris sebelumnya adalah mengenai daerah obyek penelitian dan periode waktu serta dalam penelitian ini yaitu Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005-2008. Selain itu dalam penelitian ini akan diestimasi dengan menggunakan data panel dengan metode *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Berikut ini adalah ringkasan kajian empiris oleh beberapa penelitian yang digunakan sebagai acuan penelitian ini :

Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2006) dengan judul “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis yang dilakukan adalah analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data. Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Poverty} = & \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{Populasi} + \beta_3 \text{Agrishare} + \beta_4 \text{Industrieshare} \\ & + \beta_5 \text{Inflasi} + \beta_6 \text{SMP} + \beta_7 \text{SMA} + \beta_8 \text{DIPLOMA} + \beta_9 \text{Dummy} \\ & \text{Krisis} + \varepsilon \end{aligned}$$

Dimana:

Poverty = Tingkat kemiskinan

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

Agrishare = *Share* pertanian terhadap PDRB

Industrieshare = *Share* sektor industri terhadap PDRB

Inflasi = Tingkat inflasi

SMP = jumlah lulusan setingkat SMP

SMA = jumlah lulusan setingkat SMA

DIPLOMA = jumlah lulusan setingkat Diploma

Dummy Krisis = dummy krisis ekonomi

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan PDRB mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan Jumlah Penduduk mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Inflasi mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Share pertanian dan industri mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan tingkat pendidikan mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan. Dimana pengaruh tingkat pendidik SMP lebih besar daripada pengaruh share pertanian. Sedangkan kenaikan Dummy krisis mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adit Agus Prastyo (2010) dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan”. Tulisannya meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, variabel upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Deny Tisna Amijaya (2008) dengan judul “Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004”. Tulisannya meneliti tentang pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia, dalam hal ini untuk seluruh Provinsi di Indonesia dari tahun 2003 – 2004. Analisis yang dilakukan adalah analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data.

Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri sebagai berikut:

$$MS = f (GR, PDRB, PG)$$

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + U_{it}$$

dimana:

MS = jumlah kemiskinan.

GR = variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan.

PDRB = variabel tingkat pertumbuhan ekonomi.

PG = variabel tingkat pengangguran.

$i$  = *cross section*.

$t$  = *time series*.

$\beta_0$  = konstanta.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien.

$U$  = *error*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rasidin K. Sitepul dan Bonar M. Sinaga (2009) dengan judul “Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium”. Tulisannya menganalisis tentang Bagaimana pengaruh investasi sumberdaya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan in Indonesia dengan menggunakan kombinasi model Komputasi Keseimbangan umum dan metode *Foster-Greer-Thorbecke*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Peningkatan investasi sumberdaya manusia secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja yang mendorong pada peningkatan Produk Domestik Bruto Riil, yang ditunjukkan oleh peningkatan stok kapital, neraca perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Investasi sumberdaya manusia untuk pendidikan dapat menurunkan *poverty incidence*, *poverty depth* dan *poverty severity* kecuali untuk rumahtangga bukan pertanian golongan atas di desa, bukan angkatan kerja di kota dan bukan pertanian golongan atas di kota.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Octaviani (2001) dengan judul “Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke”. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Model yang digunakan adalah

modifikasi model ekonometri yang dikemukakan oleh Cutler dan Katz (1991), yaitu :

$$P_t = \beta_0 + \beta_1 (P/Y)_T + \beta_2 \rho_T + \beta_3 \mu_t + \beta_4 G_t + \varepsilon_t$$

Dimana:

$P_t$  = tingkat kemiskinan agregat pada tahun ke t diukur dengan indeks FGT

$(P/Y)_t$  = rasio garis kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata

$\rho_T$  = tingkat inflasi

$\mu_t$  = tingkat pengangguran

$G_t$  = rasio gini

$\varepsilon_t$  = *error term*

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan angka pengangguran mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, sebaliknya semakin kecil angka pengangguran akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Usman, Bonar M. Sinaga, dan Mermanto Siregar (2009) dengan judul “Analisis Determinan Kemiskinan Sebelum Dan Sesudah Desentralisasi Fiskal”. Tulisannya menganalisis tentang Bagaimana pengaruh penerapan desentralisasi fiskal terhadap determinasi kemiskinan. Dimana Analisis tentang variabel-variabel yang berhubungan dengan kemiskinan atau determinan kemiskinan untuk menjawab tujuan dari studi ini dilakukan dengan menggunakan Model Regresi Logit atau disingkat Model Logit.

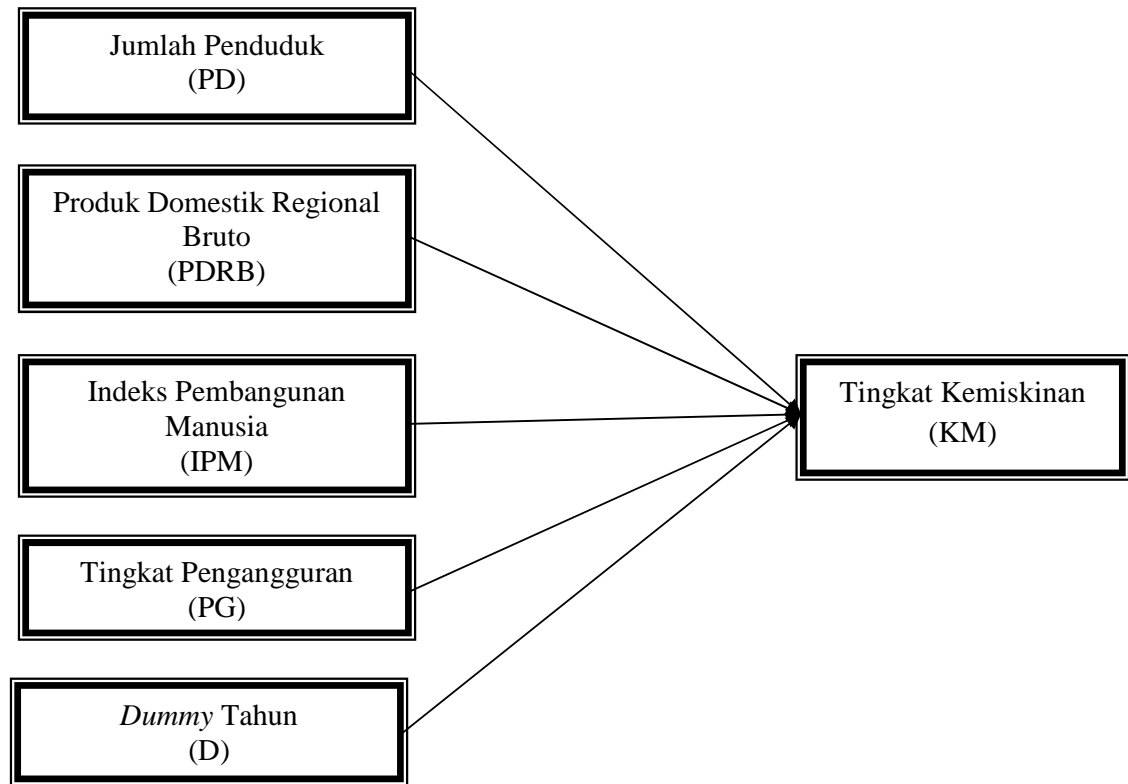
Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel yang dapat menambah kemiskinan berturut-turut dari nilai *marginal effect* terbesar adalah jumlah anggota rumah tangga, kepala keluarga sebagai buruh tani, sumber air yang tidak terlindung, dan kepala keluarga bekerja di bidang pertanian. Variabel yang dapat mengurangi kemiskinan adalah kepala rumah tangga yang bekerja, kepemilikan aset lahan pertanian, dan jumlah tahun bersekolah seluruh anggota keluarga.

Yani Mulyaningsih (2008), melakukan studi mengenai “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia Dan Pengurangan Kemiskinan”. Studi tersebut menyatakan bahwa seperti kita ketahui pembangunan manusia yang di *proxy* dari indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*Longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

#### **2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang skematis:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



## 2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara/ kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

2. Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Jawa Tengah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah.
3. Diduga variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Diduga variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Variabel penelitian merupakan *construct* atau konsep yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

##### 1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian adalah tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada tahun 2005-2008.

##### 2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran.

Langkah berikutnya setelah menspesifikasi variabel-variabel penelitian adalah melakukan pendefinisian secara operasional. Hal ini bertujuan agar variabel penelitian yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan, sehingga memberikan petunjuk tentang bagian suatu variabel dapat diukur.

Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Tingkat Kemiskinan (KM)**

Tingkat kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Garis kemiskinan yang merupakan dasar perhitungan jumlah penduduk miskin ditentukan dua kriteria yaitu pengeluaran konsumsi perkapita per bulan yang setara dengan 2100 kalori perkapita per hari dan nilai kebutuhan minimum komoditi bukan makanan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah tingkat kemiskinan, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk total kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 – 2008 (dalam satuan persen).

### **2. Jumlah Penduduk (PD)**

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Jawa Tengah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data yang digunakan adalah jumlah penduduk tahun 2005 – 2008 (dalam satuan jiwa).

### **3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung

kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. PDRB yang dimaksud adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dan dinyatakan dalam juta rupiah tahun 2005 – 2008 (dalam satuan rupiah).

#### **4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi. Data yang digunakan adalah indeks pembangunan manusia tahun 2005 – 2008 (dalam satuan persen).

#### **5. Tingkat Pengangguran (PG)**

Pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah orang yang masuk angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan

karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan pekerjaan bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja. Data yang digunakan untuk melihat pengangguran adalah perbandingan antara pengangguran terbuka dengan jumlah penduduk di Jawa Tengah tahun 2005 – 2008 (dalam satuan persen).

### **3.2 Jenis Dan Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Data sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (*time series*) dari tahun 2005 - 2008 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 35 data mewakili kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pemilihan periode ini disebabkan karena kemiskinan mengalami fluktuasi dan terjadinya peningkatan PDRB dan diikuti dengan peningkatan pengangguran di tahun 2006, sehingga penelitian pada periode tersebut menarik untuk diamati serta data tersedia pada tahun tersebut. Periode data yang digunakan adalah data tahun 2005 - 2008 untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data yang diperlukan adalah:

1. Data tingkat kemiskinan daerah untuk masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 - 2008.
2. Data jumlah penduduk untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008.
3. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008.
4. Data Indeks Pembangunan Manusia untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008.
5. Data pengangguran terbuka untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008.

Adapun sumber data tersebut diatas diperoleh dari:

1. Data tingkat kemiskinan daerah untuk masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 - 2008, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Data dan Informasi Kemiskinan”.
2. Data jumlah penduduk untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Jawa Tengah Dalam Angka”.
3. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “PDRB Jawa Tengah”. Jumlah penduduk untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Jawa Tengah Dalam Angka”.

4. Data Indeks Pembangunan Manusia yang diproksi dari angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita disesuaikan untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Jawa Tengah Dalam Angka”.
5. Data pengangguran untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah”.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Anto Dajan (2001) Menyatakan bahwa metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kuantitatif, disamping itu metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada obyek yang diteliti.

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2005 – 2008. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, surat kabar, serta dari *browsing website internet* yang terkait dengan masalah kemiskinan.

### 3.4 Metode Analisis

#### 3.4.1 Metode Analisis Data Panel

Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 4.1. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time-series data*) dan kerat lintang (*cross-section data*). Gujarati (2003) menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu. Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots(3.1)$$

dimana N adalah banyaknya data *cross-section*

Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots(3.2)$$

dimana T adalah banyaknya *data time-series*

Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(3.3)$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

dimana :

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

$N \times T$  = banyaknya data panel

Menurut Hsiao, 1986 (dikutip dari Firmansyah, 2009) keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerat lintang adalah :

- a. Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degrees of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, dimana dapat menghasilkan ekonometri yang efisien.
- b. Dengan panel data, data lebih informatif, lebih bervariasi, yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* dan *time series* saja.
- c. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

Dalam analisis model panel data dikenal, dua macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis panel data dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan efek tetap (*Fixed effect*)

Salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*time-series*).



Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

2. Pendekatan efek acak (*Random effect*)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model panel data yang di dalamnya melibatkan korelasi antar error term karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error (*error component model*) atau disebut juga model efek acak (*random effect*).

Menurut Judge ada empat pertimbangan pokok untuk memilih antara menggunakan pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*) dalam data panel :

1. Apabila jumlah *time-series* (T) besar sedangkan jumlah *cross-section* (N) kecil, maka hasil *fixed effect* dan *random effect* tidak jauh berbeda sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung yaitu *fixed effect model (FEM)*.
2. Apabila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (*random*) maka *random effect* harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang

kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan *fixed effect*.

3. Apabila komponen *error*  $\varepsilon_i$  individual berkorelasi maka penaksir *random effect* akan bias dan penaksir *fixed effect* tidak bias.
4. Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect*.

### 3.4.2 Estimasi Model

Penelitian mengenai pengaruh variabel Jumlah Penduduk (PD), variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan variabel tingkat pengangguran (PG) terhadap jumlah kemiskinan (KM) menggunakan data *time-series* selama empat tahun yang diwakili data tahunan dari 2005 - 2008 dan data *cross-section* sebanyak 35 data mewakili kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menghasilkan 140 observasi.

Gujarati (2003) menjelaskan bahwa estimasi model regresi panel data dengan pendekatan *fixed effect* tergantung pada asumsi yang digunakan pada intersep, koefisien slope, dan *error term*, dimana ada beberapa kemungkinan asumsi yaitu :

- a. Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope adalah konstan antar waktu (*time*) dan ruang (*space*) dan *error term* mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu.
- b. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu.

- c. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu dan waktu.
- d. Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu.
- e. Intersep sebagaimana koefisien slope bervariasi antar individu dan waktu.

Wing Wahyu Winarno (2007) menjelaskan bahwa, dalam menganalisis data panel, teknik paling sederhana mengasumsikan data gabungan yang ada menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Hasil analisis regresi dianggap berlaku pada semua obyek pada semua waktu. Metode ini sering disebut dengan *common effect*.

Kelemahan asumsi tersebut adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap obyek saling berbeda, bahkan satu obyek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi obyek tersebut pada waktu yang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu model yang menunjukkan perbedaan konstanta antar obyek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Model tersebut dikenal dengan efek tetap (*fixed effect*), yaitu bahwa suatu obyek memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*). Untuk membedakan satu obyek dengan obyek lainnya, digunakan variabel semu (*dummy*), sehingga model ini dikenal dengan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

Penggunaan variabel *dummy* tergantung pada tujuan analisisnya, bila variabel *dummy* digunakan untuk melihat perbedaan konstanta antar waktu, maka data disusun berdasarkan waktu observasi (*stacked by date*). Namun bila variabel

*dummy* digunakan untuk melihat perbedaan konstanta antar obyek, maka data disusun berdasarkan obyek observasi (*stacked by cross*).

Dalam pengaplikasian variabel *dummy*, terdapat suatu waktu atau obyek observasi yang dijadikan tolak ukur (*benchmark*). Untuk data *stacked by date* yang digunakan sebagai benchmark adalah periode waktu awal observasi. Misal dalam penelitian ini, karena observasinya adalah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008, maka yang digunakan sebagai *benchmark* dalam data *stacked by date* adalah tahun 2005. Sedangkan pada data *stacked by cross*, *benchmark* yang digunakan adalah salah satu atau sekelompok data tertentu. Pada berbagai penelitian, obyek yang digunakan sebagai *benchmark* pada umumnya adalah obyek yang memiliki karakteristik yang paling baik berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang digunakan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, pengaruh variabel Jumlah Penduduk (PD), variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan variabel tingkat pengangguran (PG) dan *dummy* tahun 2006, 2007, dan 2008 (D2,D3,D4) terhadap tingkat kemiskinan (KM) digunakan asumsi *FEM* yang kedua, yaitu koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. Bentuk model *fixed effect* adalah dengan memasukkan variabel *dummy* untuk menyatakan perbedaan intersep. Ketika variabel *dummy* digunakan untuk mengestimasi *fixed effect*, maka persamaan tersebut disebut sebagai *Least Square Dummy Variabel (LSDV)*.

Model fungsi yang akan digunakan untuk mengetahui kemiskinan di Jawa Tengah yaitu:

$$KM = f (PD, PDRB, IPM, PG, D2, D3, D4) \dots\dots\dots$$

. (3.4)

$$KM = \beta_0 + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 PG_{it} + \beta_5 D_2 + \beta_6 D_3 + \beta_7 D_4 + \mu_i \dots$$

.(3.5)

dimana:

KM	=	Tingkat kemiskinan dalam persen.
PD	=	variabel Jumlah Penduduk dalam jiwa.
PDRB	=	variabel PDRB harga konstan 2000 dalam rupiah.
IPM	=	variabel IPM
PG	=	variabel tingkat pengangguran dalam persen.
D2	=	<i>dummy</i> tahun 2006
D3	=	<i>dummy</i> tahun 2007
D4	=	<i>dummy</i> tahun 2008
<i>i</i>	=	unit <i>cross section</i> .
<i>t</i>	=	unit <i>time series</i> .
$\beta_0$	=	konstanta.
$\beta$	=	<i>koefisien</i> .
$\mu$	=	<i>residual</i>

Karena terdapat perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural (Imam Ghozali, 2005) adalah sebagai berikut :

- a. Menghindari adanya heteroskedastisitas
- b. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas
- c. Mendekatkan skala data

Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah dalam bentuk semilog linear (*semi-log*). Dimana *semi-log* mempunyai beberapa keuntungan diantaranya (1) koefisien-koefisien model semilog mempunyai interpretasi yang sederhana, (2) model semilog sering mengurangi masalah statistik umum yang dikenal sebagai heteroskedastisitas, (3) model semilog mudah dihitung. Sehingga persamaan menjadi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KM = & \beta_0 + \beta_1 \text{LOG}(\text{PD})_{it} + \beta_2 \text{LOG}(\text{PDRB})_{it} + \beta_3 (\text{IPM})_{it} + \beta_4 (\text{PG})_{it} + \beta_5 D_2 + \beta_6 D_3 + \beta_7 D_4 \\
 & + \mu_i \dots\dots\dots \\
 & (3.6)
 \end{aligned}$$

keterangan:

$$\begin{aligned}
 \beta_1 - \beta_7 & = \text{koefisien.} \\
 \mu & = \text{residual}
 \end{aligned}$$

### 3.5 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

#### 3.5.1 Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Imam Ghazali, 2002). Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidak gangguan ( $\mu$ ) antara lain J-B test dan metode grafik. Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung skweness dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai  $\chi^2$  (*chisquared*) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal. Model untuk mengetahui uji normalitas adalah:

$$J - B \text{ hitung} = \left[ S^2/6 + \left( \frac{k-3}{24} \right)^2 \right] \dots\dots\dots (3.7)$$

dimana:

S = Skewness statistik

K = Kurtosis

Jika nilai  $J - B \text{ hitung} > J-B \text{ tabel}$ , maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual  $U_t$  terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya.

### 3.5.2 Deteksi Multikolinearitas

Pada mulanya multikolinearitas berarti adanya hubungan linear (korelasi) yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Tepatnya istilah multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti dan istilah kolinearitas berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linear. Tetapi perbedaan ini jarang diperhatikan dalam praktek, dan multikolinearitas berkenaan dengan kedua kasus tadi (Gujarati, 2003). Multikolinearitas dalam penelitian dideteksi dengan melihat:

- Matriks koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas. Kaidah yang digunakan adalah apabila koefisien korelasi antara dua variabel bebas lebih besar dari 0,8 maka kolinearitas berganda merupakan masalah yang serius. Namun korelasi pasangan ini tidak memberikan informasi yang lebih dalam untuk hubungan yang rumit antara tiga atau lebih peubah.

### 3.5.3 Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel yang pada periode lain, dengan kata lain

variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien. (Gujarati, 2003). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji *Breusch-Godfrey Test* atau Uji *Lagrange Multiplier (LM)*.

Dari hasil uji LM apabila nilai Obs\*R-squared lebih besar dari nilai  $\chi^2$  tabel dengan *probability*  $\chi^2 < 5\%$  menegaskan bahwa model mengandung masalah autokorelasi. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai Obs\*R-squared lebih kecil dari nilai  $\chi^2$  tabel dengan *probability*  $\chi^2 > 5\%$  menegaskan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi.

Apabila data mengandung autokorelasi, data harus segera diperbaiki agar model tetap dapat digunakan. Untuk menghilangkan masalah autokorelasi, maka dilakukan estimasi dengan diferensi tingkat satu (Wing Wahyu Winarno, 2009)

#### **3.5.4 Deteksi Heteroskedastisitas**

Deteksi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien (Gujarati and Porter, 2003). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan



menggunakan *white heteroscedasticity-consistent standart errors and covariance* yang tersedia dalam program Eviews 6. Uji ini diterapkan pada hasil regresi dengan menggunakan prosedur equations dan metode OLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dari uji ini adalah nilai  $F$  dan  $Obs*Rsquared$ , secara khusus adalah nilai probability dari  $Obs*Rsquared$ . Dengan uji *White*, dibandingkan  $Obs*R-squared$  dengan  $\chi^2$  (*chi-squared*) tabel. Jika nilai  $Obs*R-squared$  lebih kecil dari pada  $\chi^2$  tabel maka tidak ada heteroskedastisitas pada model.

### 3.6 Pengujian Kriteria Statistik

Gujarati (1995) menyatakan bahwa uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah  $H_0$  dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada.

Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji  $t$ ), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji  $F$ ), dan pengujian koefisien determinasi *Goodness of fit test* ( $R^2$ ).

#### 3.6.1 Pengujian Signifikansi Simultan (Uji $F$ )

Uji  $F$  dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai  $F$  hitung lebih besar dari nilai

F tabel maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan :

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = 0$$

$H_1$ : minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol (Gujarati, 1995)

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / (K - 1)}{(1 - R^2) / (N - K)} \dots \dots \dots (3.9)$$

Dimana :

K = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1.  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak apabila F hitung < F tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2.  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima apabila F hitung > F tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

### **3.6.2 Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t)**

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan:

1.  $H_0 : \beta_1 \leq 0$       tidak ada pengaruh antara variabel jumlah penduduk dengan tingkat kemiskinan.  
 $H_1 : \beta_1 > 0$       ada pengaruh positif antara jumlah penduduk dengan tingkat kemiskinan.
2.  $H_0 : \beta_2 \leq 0$       tidak ada pengaruh antara variabel PDRB dengan tingkat kemiskinan.  
 $H_1 : \beta_2 < 0$       ada pengaruh negatif antara variabel PDRB dengan tingkat kemiskinan.
3.  $H_0 : \beta_3 \leq 0$       tidak ada pengaruh antara variabel IPM dengan tingkat kemiskinan.  
 $H_1 : \beta_3 < 0$       ada pengaruh negatif antara variabel IPM dengan tingkat kemiskinan.
4.  $H_0 : \beta_4 \leq 0$       tidak ada pengaruh antara variabel tingkat pengangguran dengan tingkat kemiskinan.  
 $H_1 : \beta_4 > 0$       ada pengaruh positif antara variabel tingkat pengangguran dengan tingkat kemiskinan.

Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus:

$$t = \frac{\beta_i - \beta_i^*}{SE(\beta_i)} \dots \dots \dots$$

(3.8)

Dimana:

$\beta_i$             = parameter yang diestimasi

$\beta_i^*$            = nilai  $\beta_i$  pada hipotesis

$SE(\beta_i)$      = standar error  $\beta_i$

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b) Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### 3.6.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Imam Ghozali (2002) menyatakan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai ( $R^2$ ) adalah antara nol dan satu. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* ( $R^2$ ) pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan formula:

$$R^2 = \frac{\Sigma(\hat{Y}_1 - \bar{Y})^2}{\Sigma(Y_1 - \bar{Y})^2} \dots\dots\dots (3.10)$$

dimana:

$y^*$  = nilai y estimasi

$y$  = nilai y aktual